

Judul : Waspada! 'limbah pendidikan'
Tanggal : Selasa, 21 Juli 2020
Surat Kabar : Republik
Halaman : 2

Waspada! 'Limbah Pendidikan'

Kurikulum terpadu masa pandemi dinilai mendesak.

■ RIZKYAN ADIYUDHA,
INAS WIDYANURATIKAH

JAKARTA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengingatkan potensi adanya limbah pendidikan akibat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut berpotensi muncul jika proses pelaksanaan PJJ tidak berjalan secara maksimal.

"Jadi kalau proses PJJ atau daring ini gagal, nanti akan ada limbah pendidikan yang disebut dengan *lost generation*," kata Ketua Pengurus Besar (PB) PGRI Dudung Koswara di Jakarta, Senin (20/7). Dia menjelaskan, limbah generasi itu terlahir dari proses pendidikan yang tidak maksimal sehingga anak memiliki pengetahuan yang rendah.

Dudung mengatakan, hingga saat ini, PJJ masih memiliki sejumlah kendala. Misalnya, keterbatasan jaringan, kepemilikan perangkat digital, baik laptop, gawai pintar di antara para peserta didik terlebih di daerah, maupun kemampuan beradaptasi terhadap teknologi bagi para tenaga pengajar.

Meskipun demikian, Dudung mengakui, idealnya seorang guru harus juga tetap memiliki kemampuan

melaksanakan PJJ. "Maka semua guru dipaksa beradaptasi sehingga idealnya semua mampu melaksanakan proses PJJ," katanya.

Di samping itu, Dudung juga meminta setiap kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum agar membuat format tertentu untuk memudahkan para guru. Hal itu agar kendala dalam kemampuan pemahaman teknologi, kuota, dan hal lainnya yang belum siap bisa teratasi.

Dudung mengungkapkan, saat ini kepala sekolah dan para guru juga terus melakukan pembahasan dalam *forum group discussion* (FGD) hingga lokakarya pendalaman berkenaan dengan metode PJJ. Menurut dia, yang paling penting tidak boleh anak didik terputus dengan gurunya dan mereka tetap dapat belajar dengan metode, yang tidak memberatkan karena tidak ada tatap muka. "Bahkan, harus ada komunikasi antara guru dan orang tua. Keduanya harus ada komunikasi sehingga orang tua juga berubah wujud jadi guru juga," ujarnya.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, masih menanti perubahan kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebab, hingga saat ini,

kurikulum yang mestinya digunakan untuk tahun ajaran baru pada masa pandemi belum juga berlaku.

Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti mengatakan, saat ini hanya kurikulum SD yang sudah disesuaikan. "Yang kami tahu dalam pengawasan kami, baru SD yang selesai, yaitu menyederhanakan dari 60 menjadi 32 KD (kompetensi dasar)," kata Retno, dalam diskusi daring, akhir pekan lalu.

Namun, untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK masih belum ada penyesuaian kurikulum. Desakan ini terus disuarakan KPAI di berbagai kesempatan. Bahkan, lanjut Retno, pihaknya juga menulis surat ke kementerian dan Presiden. "Namun, pada 13 Juli 2020 mulainya tahun ajaran baru tidak juga selesai," kata Retno menambahkan.

Tidak disederhanakannya kurikulum, menyebabkan PJJ masih tidak optimal, sama seperti pada awal masa pandemi. Akhirnya, KPAI banyak melihat PJJ seperti sekolah yang dilakukan di rumah dengan jam pelajaran yang sama.

Sebelumnya, pada awal masa pandemi, KPAI juga mendapatkan banyak keluhan terkait PJJ yang menyebabkan anak tertekan. Di antara keluhan itu, yaitu guru terlalu banyak memberikan tugas, sementara gawai yang dimiliki setiap siswa berbeda-beda.

Kemendikbud sebenarnya sudah membuat surat edaran yang mendo-

rong sekolah tidak mengejar ketuntasan kurikulum, dan lebih mengutamakan pembelajaran bermakna selama masa pandemi. Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekolah yang masih mengejar ketuntasan kurikulum sehingga siswa tertekan.

Terkait hal ini, KPAI sejak April mendorong Kemendikbud membuat kurikulum khusus pandemi. Kurikulum pada masa pandemi mestinya disederhanakan, karena pembelajaran berlangsung tidak seperti biasanya. "Guru yang mengejar ketuntasan kurikulum yang tidak berubah ya pasti ini akan terjadi dan ini terjadi pengulangan," kata Retno.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud), Nadiem Makarim, pekan lalu menegaskan di depan anggota DPR bahwa konsep PJJ bukan kebijakan yang mereka inginkan. Ia menyadari, konsep itu juga tak bisa berjalan efektif, apalagi secara permanen. Menurut Nadiem, pemerintah sementara ini hanya mengutamakan kesehatan para siswa.

Soal infrastruktur listrik dan internet di daerah-daerah tertentu yang tak memungkinkan PJJ, Nadiem mengatakan, akan berkoordinasi dengan kementerian lain. "Kami akan pastikan bahwa ke depan, dengan koordinasi dengan kementerian/lembaga akhirnya infrastruktur internet dan listrik menjadi prioritas selama tiga hingga empat tahun ke depan," ujar dia. ■ fitriyan.zamzami